

Judul : Netralitas Pj Kepala Daerah kian dipertanyakan
Tanggal : Kamis, 16 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Netralitas Pj Kepala Daerah kian Dipertanyakan

Penjabat kepala daerah yang memiliki preferensi politik berisiko pada kecurangan pemilu karena memiliki kewenangan besar.

YAKUB PRYATAMA WIJAYAATMAJA
yakub.p@mediaindonesia.com

INDIKASI keterlibatan sejumlah penjabat kepala daerah dalam upaya pemenangan calon presiden tertentu semakin menyerauk.

Setelah terbongkarnya surat yang diduga merupakan pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo pada pilpres mendatang, kini Pj Bupati Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Bahri, juga dilaporkan kepada Bawaslu karena diduga mengkampanyekan Ganjar dan calon anggota DPD Laode Umar Bonte.

Indikasi yang sama diduga terjadi pula di Jawa Tengah pada 15 Agustus 2023 lalu saat DPD PDIP Jateng mengadakan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah yang berasal dari partai tersebut di Hotel Padma Semarang.

Anchnya, dalam pertemuan internal itu beberapa Pj kepala daerah yang merupakan ASN ikut hadir, seperti Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar, Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin, dan Pj Wali Kota Salariga Sinoeng Nugroho. Belakangan ketiganya mengaku sekadar menghadiri undangan dan tidak ada pengarah soal pemenangan capres.

Direktur Komunikasi Publik Pusat Kajian Pemilu Indo-

nesia (Puskapi) Zaenal Abidin berpendapat beberapa indikasi kasus itu kian menunjukkan adanya dugaan permainan elite pusat mengatur pejabat daerah.

Menurutnya, hajatan pemilu dan pilpres memang menjadi ujian tersendiri bagi kepala daerah dan terutama Pj kepala daerah. Netralitas mereka sebagai pejabat publik yang sangat dibutuhkan demi menghadirkan pilpres yang jujur, dan adil kerap terlanggar.

"Jika Pj kepala daerah menyampaikan dukungan terbuka kepada capres tertentu, ada kemungkinan perangkat kekuasaan di daerah itu akan digunakan untuk memenangkan capres tersebut. Ini masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan. Praktik seperti ini merusak demokrasi dan mencederai upaya mewujudkan pemilu bersih," ungkap Zainal, kemarin.

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Aisah Putri Budiatri menyebut penyalahgunaan kewenangan Pj kepala daerah berpotensi terjadi akibat proses pemilihan yang tidak berbasis *merit system*, dan tidak melibatkan publik.

"Penunjukan dengan model itu akan rentan pada konflik kepentingan, apalagi ketika Pj kepala daerah punya preferensi politik dalam pemilu," ungkap Aisah kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Ia menilai Pj kepala daerah yang memiliki preferensi politik berisiko pada kecurangan pemilu karena memiliki kewenangan besar sekaligus pengaruh di ruang

publik terutama di daerah tersebut. "Pj kepala daerah ada di 271 daerah sehingga tak mudah diawasi publik," ucapnya.

Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Antonius Benny Susetyo mengingatkan bahwa demokrasi menuntut kesadaran etis, yakni kepatuhan pada nilai-nilai sesuai dengan cita-cita berbangsa dan bernegara. "Harus ada *political will* dari penyelenggara negara bahwa mereka memang tidak bermain dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk mobilisasi kepentingan satu partai atau capres itu," ungkapnya.

PDIP minta usut tuntas

Saat menanggapi hal tersebut, terutama terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta agar hal tersebut diusut tuntas. "Diusut saja semuanya," kata Hasto, kemarin.

Ia menekankan kemenangan yang diraih pada Pilpres 2024 nanti adalah herkat suara rakyat. "Kita menang ini suara rakyat, kita menang hukan karena pakta integritas," tegas Hasto.

Kementerian Dalam Negeri juga menampik adanya pakta integritas Pj kepala daerah. "Pakta integritas Pj Bupati Sorong yang memuat arahan pemenangan Ganjar sebagai presiden bukan dari Kemendagri," ujar Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga.

Sementara itu, Bawaslu menyebut akan segera mendalami dugaan adanya pakta integritas itu. "Segera menelusuri dan mendalami informasi awal tersebut," kata anggota Bawaslu RI, Puadi. (Yon/Fah/Ind/Tri/AS/X-3)